

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI SEKTOR PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF EKOFEMINISME

Aulia Rahmawati

Universitas Padjadjaran dan aulia20009@mail.unpad.ac.id

Rudi Saprudin Darwis

Universitas Padjadjaran dan rudi.darwis@unpad.ac.id

Abstract

The topic of women in the tourism sector has been extensively researched. However, there have been few studies that attempt to examine the involvement of women in tourism from an ecofeminist perspective. Yet, women and the environment are primary issues in ecofeminist discourse. Therefore, this article will discuss the empowerment of women in the tourism sector from an ecofeminist perspective. In addition to enriching the study of women and tourism, this article also aims to highlight the importance of empowering women to achieve sustainable tourism. The research is conducted using a literature review method. The results show that the empowerment of women can lead to increased income, a sense of pride in where they live, opportunities for involvement and decision-making, as well as good relationships within their groups. These results will also indirectly bring the community closer to the creation of sustainable tourism.

Keywords:

Women empowerment; tourism; ecofeminism; sustainable tourism

Abstrak

Topik mengenai perempuan dalam sektor pariwisata sudah cukup banyak diteliti. Namun, hanya ada sedikit penelitian yang mencoba melihat keterlibatan perempuan dalam pariwisata melalui perspektif ekofeminisme. Padahal, perempuan dan lingkungan merupakan isu utama dalam pembahasan ekofeminisme. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai pemberdayaan perempuan dalam sektor pariwisata melalui perspektif ekofeminisme. Selain untuk memperkaya studi mengenai perempuan dan pariwisata, artikel ini juga bertujuan untuk melihat pentingnya pemberdayaan perempuan untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Hasilnya, pemberdayaan perempuan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan, munculnya rasa bangga terhadap tempat tinggal, terbukanya kesempatan untuk terlibat dan mengambil keputusan, serta terjalin hubungan yang baik dalam kelompok. Hasil tersebut juga secara tidak langsung akan mendekatkan masyarakat pada terciptanya pariwisata berkelanjutan.

Kata Kunci:

Pemberdayaan perempuan; pariwisata; ekofeminisme; pariwisata berkelanjutan

PENDAHULUAN

Berlibur dan pergi ke tempat wisata merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan. Setiap tahun muncul tempat

wisata baru yang menarik untuk dikunjungi. Adanya media sosial membuat tempat-tempat wisata jadi lebih mudah untuk terekspose dan mengundang banyak

pengunjung. Disadari atau tidak, ketika berwisata kita akan melibatkan banyak orang. Mulai dari mempersiapkan akomodasi perjalanan, makanan, membeli cinderamata, hingga kembali dari berwisata kita akan bertemu dengan berbagai orang dengan profesi yang berbeda, namun masih bekerja dalam sektor pariwisata. Maka dari itu, tidak mengherankan apabila sektor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2017, kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 536,8 triliun, 4,1% dari total PDB Indonesia. Pada tahun yang sama, pariwisata menyediakan 12,7 juta pekerjaan, mewakili 10,5% dari total lapangan kerja. Penerimaan pariwisata berjumlah Rp200 miliar dan sektor ini mengungguli pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum (OECD, 2020). Menurut Menparekraf Sandiaga dalam jumpa pers akhir tahun (JPAT) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), pada tahun 2022 kontribusi pariwisata pada PDB hingga kuartal tiga mencapai 3,6%. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berada di 2,4% (panrb, 2022). Persentase tersebut terbilang cukup baik mengingat dunia baru saja diterpa pandemi Covid-19.

Pariwisata Berkelanjutan

Mengingat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia, maka terlihat jelas betapa pentingnya pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Sayangnya, perkembangan sektor pariwisata tidak selalu berdampak positif. Selain dampak positif terhadap perekonomian negara, pariwisata juga dalam kasus tertentu dapat berkontribusi pada pemahaman budaya yang lebih luas dengan menciptakan kesadaran, menghormati

keragaman budaya dan cara hidup. Terlebih lagi di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Namun, di sisi lain, sebagai alat untuk memenuhi lapangan kerja, sektor pariwisata masih belum maksimal. Pada saat yang sama, keluhan dari daerah tujuan wisata mengenai dampak negatif yang masif terhadap lingkungan, budaya dan cara hidup penduduk telah menimbulkan tuntutan untuk pembangunan pariwisata yang lebih berkelanjutan (Yazdi, 2012). Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif tersebut diperlukan strategi untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan.

UNWTO (2013) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai “pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah”. Pariwisata berkelanjutan menyangkut aspek-aspek penting, seperti bisnis pariwisata yang kompetitif dan bertanggung jawab secara sosial, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pariwisata bagi semua warga negara, kesempatan kerja yang baik di sektor ini dan manfaat dari kegiatan pariwisata bagi masyarakat setempat (Niedziółka, 2012). Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan untuk memastikan bahwa sektor kepariwisataan harus berorientasi jangka panjang dan bermanfaat bagi masyarakat setempat pada saat ini dan tetap dapat menjaga kualitas hidup generasi yang akan datang (Amerta et al., 2018).

Pemberdayaan Perempuan dalam Sektor Pariwisata

Stein (1997) mendefinisikan pemberdayaan sebagai “proses aksi sosial yang mempromosikan partisipasi orang,

organisasi, dan komunitas dalam memperoleh kendali atas kehidupan mereka dalam komunitas mereka dan masyarakat yang lebih besar". Dalam perspektif feminisme, pemberdayaan lebih dari partisipasi dalam pengambilan keputusan; pemberdayaan juga harus mencakup proses yang mengarahkan orang untuk menganggap diri mereka mampu dan berhak membuat keputusan. Maka dari itu, pemberdayaan perempuan tidak hanya mencakup pelatihan-pelatihan yang diberikan atau kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

Dari banyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata, *Hasil Global Report on Women and Tourism* oleh (UNWTO, 2019) menunjukkan bahwa pekerja perempuan mendominasi dengan persentase mencapai 54%. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa 14,7% perempuan di sektor pariwisata menerima penghasilan yang lebih rendah. Walaupun perempuan mendominasi, namun bukan berarti perempuan sudah berdaya dan terlibat secara adil dalam sektor pariwisata. Hemmati (dalam Freund & Maskivker, 2021) mengungkapkan bahwa secara vertikal, piramida gender tidak berubah: ada segregasi gender yang signifikan di pasar tenaga kerja. Posisi yang lebih rendah dengan peluang pengembangan karir yang lebih sedikit diduduki oleh perempuan, sedangkan posisi manajerial didominasi oleh laki-laki.

Ekofeminisme

Istilah ekofeminisme pertama kali diciptakan oleh Françoise d'Eaubonne dalam bukunya yang berjudul *Le féminisme ou la mort* (1974). Sebelumnya, pada tahun 1972, Françoise d'Eaubonne telah mengembangkan istilah feminisme ekologi yang membahas bahwa "penghancuran planet disebabkan oleh motif keuntungan yang melekat pada kekuatan laki-laki" (Aziz, 2021). Di

Indonesia sendiri ekofeminisme dikembangkan oleh Ratna Megawangi yang mengutarakan bahwa obsesi ekofeminisme merupakan ide yang amat luhur dan sesuai dengan solusi dari teori *ecophilosophy* dan *deep ecology* (Fatimah, 2017).

Ekofeminisme merupakan sebuah gerakan praktis untuk perubahan sosial yang muncul dari perjuangan perempuan untuk menopang diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan komunitas mereka. Perjuangan ini dilancarkan untuk melawan "*maldevelopment*" dan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat yang patriarki, perusahaan multinasional, dan kapitalisme global (Murphy & Gaard, 1998). Karen Warren (dalam Aziz, 2021) menemukan bahwa ekofeminisme berasal dari semua bidang feminisme. Dia menegaskan bahwa lebih banyak wanita daripada pria di negara-negara berkembang yang bergantung pada alam dan sumber dayanya, terutama pada pohon dan buah-buahan. Perempuan adalah korban utama degradasi lingkungan, dan khususnya perusakan hutan. Apalagi perempuan dihadapkan pada adat dan tabu yang tidak diketahui laki-laki.

Ekofeminisme bukanlah perspektif yang baru digunakan dalam kajian mengenai sektor pariwisata. Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian mengenai pariwisata dan ekofeminisme, seperti "*Toward a Critical Ecofeminist Research Paradigm for Sustainable Tourism*" oleh Camargo et al. (2016) dan "*An Ecofeminist Approach to Ecotourism Development*" oleh Swain & Swain (2004). Phillimore & Goodson (2004: 124) menyatakan bahwa "Perspektif sudut pandang ekofeminis memiliki potensi dan aplikasi yang cukup besar untuk penelitian pariwisata. Karena pariwisata pada dasarnya adalah tentang pergi ke tempat lain, ... ini adalah tentang tempat dan juga orang. Bagi

turis dan tuan rumah mereka, lingkungan alam sama pentingnya dengan konteks budaya. Epistemologi ekofeminis terkait dengan sudut pandang penelitian yang tidak hanya memusatkan pengalaman hidup orang-orang yang terpinggirkan, tetapi juga memusatkan kebutuhan lingkungan.”

Sharpley (dalam Camargo et al., 2016) berpendapat bahwa kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak sepenuhnya mencakup tiga prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu perspektif holistik, masa depan, dan ekuitas, dan karena itu tidak dapat mencapai keberlanjutan. Terutama yang kurang dalam wacana dan program pariwisata berkelanjutan adalah prinsip dan tindakan berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Maka dari itu, untuk mencapai pariwisata berkelanjutan dibutuhkan keterlibatan yang adil untuk perempuan. Melalui perspektif ekofeminisme, pariwisata berkelanjutan tidak hanya akan berfokus pada keberlangsungan lingkungan, tetapi juga memperhatikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta masyarakat lain yang terpinggirkan. Kedua hal tersebut nantinya akan bermuara tidak terbatas pada pariwisata berkelanjutan saja, tetapi juga pada tercapainya poin-poin SDGs (*Sustainable Development Goals*).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur atau tinjauan literatur adalah survei artikel ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan dengan masalah tertentu, bidang penelitian, atau teori, dan dengan demikian, memberikan deskripsi, ringkasan, dan evaluasi kritis terhadap karya-karya ini (Ramdhani et al., 2014). Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari buku dan artikel jurnal. Terdapat kriteria

tertentu yang digunakan dalam mengumpulkan data dari artikel jurnal agar kualitas data terjamin. Artikel jurnal yang menjadi sumber data merupakan artikel jurnal yang terindeks di *google scholar*. Terdapat beberapa kata kunci yang digunakan dalam mencari buku dan artikel jurnal yang tepat, seperti pemberdayaan perempuan, pariwisata, ekofeminisme, pariwisata berkelanjutan, dan dimensi pemberdayaan psikologis, ekonomi, politik, dan sosial.

HASIL PENELITIAN

Untuk dapat melihat bagaimana pemberdayaan perempuan dapat benar-benar berdampak dalam pariwisata dibutuhkan kerangka pemberdayaan. Menurut Scheyvens (1999) terdapat empat level pemberdayaan yang bisa menjadi kerangka pemberdayaan, yaitu psikologis, sosial dan politik, berdasarkan tulisan Friedmann (Friedmann, 1992) dan pemberdayaan ekonomi. Kerangka tersebut diperkuat dengan pendapat Boley dan McGehee (dalam Elshaer et al., 2021) bahwa untuk lebih memahami pemberdayaan melalui konteks pariwisata, penting untuk melakukan “konseptualisasi pemberdayaan multidimensi” yang mencakup aspek psikologis, politik, dan sosial yang telah dikembangkan dalam konteks Barat dan juga divalidasi dalam konteks Timur.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah kapasitas perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi, berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari proses pertumbuhan dengan syarat yang mengakui nilai kontribusi mereka, menghormati martabat mereka dan memungkinkan mereka untuk menegosiasikan distribusi manfaat pertumbuhan yang lebih adil (Eyben et al., 2008). Seorang perempuan dikatakan

berdaya secara ekonomi ketika dia memiliki kemampuan untuk berhasil dan maju secara ekonomi dan kekuatan untuk membuat dan bertindak berdasarkan keputusan ekonomi (Golla et al., 2011). Pemberdayaan ekonomi terlihat ketika munculnya kegiatan pariwisata memberikan kesempatan perempuan untuk mengakses pasar tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraannya (Wardhani & Susilowati, 2021).

Lebih lanjut lagi Scheyvens (1999) juga telah menyusun tanda-tanda pemberdayaan dan tanda-tanda ketidakberdayaan dalam konteks ekowisata. Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan ditandai dengan keuntungan ekonomi yang langgeng bagi komunitas lokal. Uang tunai yang diperoleh dibagi antara banyak rumah tangga di masyarakat. Ada tanda-tanda perbaikan yang terlihat dari uang yang diperoleh (misalnya perbaikan sistem air, rumah yang terbuat dari bahan yang lebih permanen). Sedangkan tanda-tanda ketidakberdayaan ditandai dengan keuntungan tunai yang kecil dan tidak teratur bagi masyarakat lokal. Sebagian besar keuntungan masuk ke elit lokal, operator luar, lembaga pemerintah, dll. Hanya beberapa individu atau keluarga yang mendapatkan keuntungan finansial langsung dari ekowisata, sementara yang lain tidak dapat menemukan cara untuk berbagi keuntungan ekonomi ini karena mereka kekurangan modal dan/atau keterampilan yang sesuai. Studi yang dilakukan oleh Suardana (2012) di Kawasan Kuta memperlihatkan bahwa perempuan di kawasan tersebut mendapatkan penghasilan yang cukup dari sektor pariwisata. Namun, rata-rata pendapatan mereka hanya menjadi pendapatan tambahan. Walaupun begitu, setidaknya dengan penghasilan tersebut mereka memiliki posisi yang tidak jauh berbeda dalam pengambilan keputusan keluarga dengan suami mereka.

Sejalan dengan Scheyvens (2000) yang menyatakan bahwa biasanya para perempuan tidak termasuk dalam pekerjaan formal, studi di Kuta juga memperlihatkan bagaimana perempuan banyak terlibat di sektor informal (21%) dibandingkan laki-laki (14,1%). Perempuan biasanya tidak terlalu dilirik untuk mengambil peran atau jabatan tertentu dalam sektor formal.

Hasil lebih baik ditunjukkan dalam studi oleh (Wardhani & Susilowati, 2021) yang dilaksanakan di Pantai Indrayanti, Yogyakarta. Setelah mengikuti kegiatan ekowisata, perempuan yang awalnya ibu rumah tangga atau buruh tani yang ekonominya tidak stabil menjadi perempuan yang bisa membantu suami dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterlibatan mereka dalam kegiatan pariwisata mengantarkan mereka pada kemandirian finansial karena berkontribusi pada pengentasan ekonomi keluarga.

Berbeda dengan studi yang dilakukan di Kawasan Kuta dan Pantai Indrayanti, berdasarkan studi yang dilakukan di Pasar Apung Lok Baintan, salah satu destinasi wisata populer di Kalimantan Selatan memperlihatkan hasil sebaliknya, yaitu bahwa hasil dari kegiatan wisata masih belum cukup untuk menghidupi kehidupan para pedagang perempuan. Padahal, perempuan merupakan pelaku utama dalam kegiatan wisata tersebut. Bukan tanpa sebab, hal tersebut terjadi karena kegiatan perempuan dalam kegiatan wisata di Pasar Apung Lok Baintan masih terbatas pada hasil dagangan dan minim keterlibatan di organisasi pariwisata. Maka dari itu, Arisanty et al. (2020) menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi untuk perempuan di daerah tersebut masih terbilang rendah.

Pemberdayaan Psikologis

Menurut Ambad (2012), pemberdayaan psikologis mengacu pada satu set keadaan psikologis yang diperlukan bagi individu untuk merasakan kontrol dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka. Dalam konteks pariwisata, Scheyvens (1999) mengungkapkan bahwa masyarakat lokal yang kuat secara psikologis merupakan masyarakat lokal yang optimis terhadap masa depan, percaya pada kemampuan warganya, relatif mandiri dan menunjukkan kebanggaan terhadap tradisi dan budaya. Mereka juga mengalami peningkatan harga diri karena pengakuan yang didapatkan dari luar terhadap keunikan dan nilai budaya. Hal tersebut mengarahkan mereka untuk mencari kesempatan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut. Sebaliknya, untuk ketidakberdayaan ditandai dengan manfaat wisata yang belum dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka bingung, frustrasi, tidak tertarik atau kecewa. Hasil yang cukup menarik diperlihatkan dalam studi di Pasar Apung Lok Baintan dimana perempuan-perempuan yang berdagang di tempat wisata tersebut memiliki rasa bangga yang tetap terjaga walaupun secara ekonomi mereka belum merasakan manfaat yang besar. Meski tidak ada program dari desa, tidak ada kegiatan Pokdarwis, dan tidak ada program dari dinas pariwisata, para pedagang tetap akan menggarap pasar terapung. Rasa bangga, keinginan untuk melestarikan budaya, dan anggapan sungai sebagai sumber mata pencaharian merupakan penyebab hingga saat ini wisata Pasar Apung di Lok Baintan masih bertahan. Penanaman rasa bangga kepada generasi muda menjadi sangat penting karena para pedagang di sana kebanyakan merupakan ibu-ibu yang usianya sudah tidak muda lagi sehingga tanpa adanya regenerasi keberlanjutan wisata akan terancam.

Hasil menarik lainnya terjadi pada studi yang dilakukan oleh Rachmawati (2020) di dua lokasi wisata Taman Nasional Gunung Leuser, yaitu di Perkebunan Bukit Lawang dan Namo Sidang. Apabila hanya dilihat dari sisi kebanggaan terhadap budaya, maka persentasenya sangat tinggi (81,3%). Namun, kebanggaan tersebut tidak serta merta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mencari pekerjaan lokal. Pada akhirnya, hal tersebut membuat minat masyarakat untuk mencari kesempatan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut menjadi minim. Minimnya kepercayaan masyarakat disebabkan oleh terbatasnya informasi mengenai peluang pekerjaan dan proses rekrutmen yang biasanya mengutamakan orang-orang terdekat, seperti keluarga atau teman.

Selain kerangka pemberdayaan oleh Scheyvens (1999), terdapat juga konsep pemberdayaan oleh Rahayu (2018) yang mengukur pemberdayaan dengan konsep *Resident Empowerment Through Tourism Scale* (RETS) yang hanya melibatkan 3 dimensi, yaitu psikologis, politik, dan sosial. Salah satu studi yang menggunakan konsep RETS adalah studi oleh Rahayu (2018) yang dilakukan di Pentingsari. Contoh dari dampak pemberdayaan dalam dimensi psikologis yang hasilnya baik dan memuaskan dapat terlihat dari hasil studi ini. Hasilnya, beberapa pernyataan meraih nilai rata-rata yang sangat tinggi, seperti pernyataan mengenai kebanggaan menjadi warga Pentingsari, merasa istimewa dengan datangnya wisatawan ke desa tersebut, dan adanya pariwisata membuat mereka ingin menjaga keistimewaan Pentingsari. Dua pernyataan lainnya menunjukkan hasil yang tinggi, yaitu pernyataan mengenai keinginan untuk menceritakan Pentingsari kepada wisatawan dan adanya kesadaran bahwa

mereka memiliki keunikan budaya yang dapat diceritakan kepada wisatawan.

Sejalan dengan penelitian di Pentingsari, studi di Pantai Indrayanti juga mengungkapkan hasil yang baik mengenai kebanggaan, keistimewaan, dan kesadaran mengenai keunikan budaya di tempat wisata tersebut. Kebanggaan para wanita tersebut mendorong mereka untuk memiliki kesadaran bahwa dirinya istimewa menjadi bagian dari tempat tinggalnya, dan adanya kesadaran akan karakteristik yang dapat mereka kembangkan dalam menarik wisatawan (Wardhani & Susilowati, 2021). Tingginya nilai pada pernyataan-pernyataan tersebut secara sekilas menunjukkan bagaimana dimensi psikologi ini menjadi penting dan dapat turut berdampak pada kemajuan dan keberlanjutan pariwisata.

Pemberdayaan Sosial

Secara luas, Sunkad (2023) mendefinisikan pemberdayaan sosial sebagai proses membangun otonomi, kekuasaan, kepercayaan diri dan sarana lain yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Dalam konteks pariwisata, (Kunjuraman & Hussin (2016) mendefinisikan pemberdayaan sosial sebagai rasa kepemilikan oleh masyarakat setempat terhadap setiap proyek pariwisata di daerah tujuan mereka masing-masing. Pemberdayaan sosial mengacu pada situasi di mana rasa kohesi dan integritas masyarakat telah dikonfirmasi atau diperkuat oleh kegiatan seperti ekowisata (Scheyvens, 1999). Tanda bahwa telah terjadi pemberdayaan sosial adalah kegiatan ekowisata mempertahankan atau meningkatkan keseimbangan komunitas lokal. Kohesi masyarakat ditingkatkan saat individu dan keluarga bekerja sama untuk membangun usaha ekowisata yang sukses. Beberapa dana

yang terkumpul digunakan untuk tujuan pengembangan masyarakat, mis. untuk membangun sekolah atau memperbaiki jalan. Selanjutnya, ketidakberdayaan ditandai dengan terjadinya disharmoni dan kerusakan sosial. Daripada bekerja sama, individu, keluarga, kelompok etnis atau sosial-ekonomi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan manfaat yang dirasakan dari ekowisata.

Beberapa studi yang menunjukkan adanya keberhasilan dalam mencapai dimensi pemberdayaan sosial (Rahayu, 2018; Rusli et al., 2022; dan Wardhani & Susilowati, 2021). Tiga indikator atau pernyataan yang menunjukkan adanya keberdayaan secara sosial diantaranya adalah adanya pariwisata membuat lebih menyatu dengan warga lainnya, meningkatnya semangat untuk bersosialisasi, dan adanya kesempatan untuk terlibat dalam masyarakat (Rahayu, 2018 dan Wardhani & Susilowati, 2021). Indikator yang sedikit berbeda digunakan oleh Rusli et al. (2022), yaitu terbentuk dorongan untuk bersama-sama dengan masyarakat meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang potensial, mempererat hubungan antar anggota masyarakat, dan menciptakan kesadaran sebagai bagian dari anggota masyarakat. Contoh kegiatan yang dilakukan dalam dimensi sosial adalah kerjasama antar perempuan dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan, seperti dalam hal konsumsi dan cinderamata (Rahayu, 2018).

Keberdayaan sosial tidak selalu bisa dicapai oleh setiap daerah wisata. Terdapat pula studi-studi yang menunjukkan ketidakberdayaan sosial (Rachmawati, 2020 dan Sitindaon et al., 2022). Pengembangan pariwisata di Perkebunan Bukit Lawang dan Namo Sidang tampaknya tidak dapat meningkatkan kohesi masyarakat karena tidak dapat memberikan cara untuk individu

terlibat dalam komunitasnya. Minimnya kesempatan bagi seorang individu untuk terlibat dalam komunitas menyebabkan kurangnya rasa kohesi komunitas, khususnya di komunitas yang lebih luas.

Hasil yang sedikit berbeda terjadi pada studi di Pasar Apung Lok Baintan dimana Arisanty et al. (2020) mengungkapkan bahwa kegiatan di Pokdarwis tidak berlanjut dan cenderung pasif. Sedari awal dibentuk Pokdarwis didominasi oleh laki-laki, namun perempuan masih dilibatkan. Hal tersebut mengisyaratkan minimnya keterlibatan perempuan dalam komunitas. Walaupun begitu, para penjual berusaha untuk melakukan pembinaan sendiri berdasarkan tradisi tanpa adanya pelatihan dari Pokdarwis atau pemerintah setempat. Sedangkan dari hasil wawancara studi di Sungai Aeksigeaon, yang menonjol justru kejenuhan dan kebuntuan karena inisiatif masyarakat lokal masih bersifat spontan sehingga tidak terjalin kerjasama yang baik (Sitindaon et al., 2022). Hal tersebut diperparah dengan pernyataan masyarakat yang berharap pemerintah bisa lebih tegas. Artinya, peran pemerintah juga belum optimal, sama seperti yang terjadi pada studi-studi yang lain.

Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan politik menjadi penting karena dapat berkontribusi melalui peningkatan pemerataan representasi di lembaga-lembaga politik dan meningkatkan suara yang paling tidak vokal sehingga mereka dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan orang lain seperti mereka – meningkatkan kemampuan mereka untuk berbicara tentang dan untuk diri mereka sendiri, serta mendapatkan pengakuan sebagai pemilik hak untuk terlibat dalam proses demokrasi (Eyben et al., 2008). Jika suatu komunitas

ingin diberdayakan secara politis oleh ekowisata, suara dan perhatian mereka harus memandu pengembangan proyek ekowisata dari tahap kelayakan hingga pelaksanaannya. Tanda keberdayaan terlihat dari adanya struktur politik masyarakat yang adil dalam mewakili kebutuhan dan kepentingan semua kelompok dan dapat menyediakan forum dimana orang-orang dapat mengajukan pertanyaan dan keprihatinan mereka. Badan-badan yang memprakarsainya mencari pendapat dari kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok sosial yang kurang beruntung lainnya dan memberikan mereka kesempatan untuk terwakili.

Terdapat empat indikator yang digunakan dalam konsep RETS untuk mengukur pemberdayaan politik, yaitu hak suara dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan pariwisata, kesempatan untuk berpartisipasi dalam dalam proses perencanaan, keputusan berpengaruh terhadap pembangunan, dan adanya ruang untuk membagikan perhatian mengenai pembangunan pariwisata. Hasil kurang baik mengenai pemberdayaan politik diperoleh oleh beberapa studi. Perempuan sudah dilibatkan dalam diskusi-diskusi terkait pembangunan pariwisata, namun posisi mereka bukan sebagai pengambil keputusan (Arisanty et al., 2020 dan Wardhani & Susilowati, 2021).

Beberapa faktor penghambat pemberdayaan politik yang teridentifikasi dari studi yang dilaksanakan oleh Rachmawati (2020) adalah kurangnya regulasi yang baik, mekanisme proses perencanaan, struktur kelembagaan, budaya masyarakat, dan kurangnya keterlibatan dalam pengembangan pariwisata. Selain faktor penghambat tersebut, pendapat lain datang dari hasil studi Wardhani & Susilowati (2021) yang mengungkapkan

bahwa tingkat keberdayaan politik yang rendah terjadi karena perempuan yang berpartisipasi belum menyadari pentingnya pendapat mereka. Minimnya wawasan terkait pengembangan pariwisata juga membuat para perempuan enggan untuk menyuarakan idenya. Selain itu, keputusan tetap diambil oleh pengurus inti yang utamanya laki-laki sehingga keterlibatan perempuan hanya sampai pada penyampaian ide saja.

Keberdayaan politik akan tercapai apabila perempuan bisa terlibat juga dalam pengambilan keputusan seperti yang tercermin dalam studi yang dilakukan oleh Rahayu (2018) di Desa Wisata Pentingsari. Di desa tersebut, perempuan memiliki ruang untuk menyampaikan idenya dan punya peran dalam pengambilan keputusan. Namun, perempuan di sana tidak terlalu yakin apakah pendapat yang mereka sampaikan berpengaruh terhadap pembangunan pariwisata.

PEMBAHASAN

Ekofeminisme tertarik pada hubungan khusus dan signifikan antara perempuan dan alam; ia berusaha untuk menafsirkan represi dan eksploitasi mereka dalam kaitannya dengan represi dan eksploitasi lingkungan. Ekofeminis percaya bahwa hubungan ini diilustrasikan melalui nilai-nilai tradisional "perempuan" seperti timbal balik, pengasuhan, dan kerja sama, yang hadir baik di antara perempuan maupun di alam (Nkechi & Emmanuel, 2017).

Menurut para ekofeminis, semua jenis penindasan saling berhubungan, lingkungan akan terus dieksploitasi selama perempuan terpinggirkan dalam masyarakat. Terlebih lagi, ketidaksetaraan yang diciptakan dengan menggunakan faktor-faktor seperti ras, kelas, agama, jenis kelamin, usia juga akan bertahan selama bentuk penindasan lainnya masih ada. Akibatnya,

dengan menyoroti pengecualian perempuan dan eksploitasi alam, para ekofeminis bertujuan untuk memusnahkan hierarki dan dualitas serta memulihkan keharmonisan dalam masyarakat (Öztürk, 2020), tak terkecuali dalam sektor pariwisata.

Sektor pariwisata memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Lingkungan alam merupakan sumber yang fundamental untuk pariwisata, dan kerap terancam oleh aktivitas pariwisata itu sendiri dari penggunaan yang berlebihan atau tidak tepat (Holden & Fennell, 2013). Apabila dilihat dalam perspektif ekofeminisme, eksploitasi terhadap lingkungan yang merupakan sumber utama dari sektor pariwisata akan terus terjadi selama perempuan masih terpinggirkan dan tidak dilibatkan. Menurut Swain & Swain (2004), ekofeminisme membutuhkan bentuk perubahan komunitas yang kompatibel untuk berkembang, sementara ekowisata membutuhkan strategi yang kompatibel untuk mempromosikan komunitas yang berkelanjutan. Keduanya tampak menjadi *win-win combination*. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjadikan perempuan berdaya agar perempuan tidak lagi menjadi kaum yang terpinggirkan dan pada akhirnya dapat mencapai pariwisata yang berkelanjutan.

Scheyvens (1999) sudah membuat kerangka yang baik untuk mengukur dampak pemberdayaan perempuan dalam dimensi ekonomi, psikologis, politik, dan sosial. Dimensi-dimensi tersebut yang kemudian harus menjadi sorotan dan fokus dalam pemberdayaan perempuan. Dilihat dari berbagai studi yang sudah dilakukan, terlihat bahwa pemberdayaan perempuan dan pariwisata terlihat memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. Terciptanya keberdayaan perempuan berdampak pada situasi pariwisata yang lebih baik dan

berkelanjutan dan adanya pariwisata berdampak pada berdayanya perempuan-perempuan di sekitar daerah tersebut sehingga meningkatkan pendapatan, tumbuh rasa bangga terhadap tempat tinggal, terjalinnya hubungan baik antar masyarakat, dan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Hubungan tersebut memperlihatkan bagaimana perempuan dan lingkungan saling terkait dan tidak bisa dipisahkan sesuai dengan asumsi dari ekofeminisme.

Dari berbagai studi yang dilakukan dengan menggunakan kerangka pemberdayaan empat dimensi sudah cukup memperlihatkan bagaimana kondisi pemberdayaan perempuan di beberapa daerah wisata di Indonesia. Sayangnya, sebagian besar studi yang dilakukan hanya fokus pada hasil mengenai apakah perempuan sudah berdaya atau belum. Hal tersebut tak terlepas dari penggunaan metode kuantitatif yang digunakan oleh sebagian studi sehingga hasilnya kurang bisa mengeksplorasi bentuk atau aktivitas pemberdayaan yang dilakukan seperti apa, contoh nyata program pemberdayaan yang dilakukan seperti apa (khususnya untuk studi-studi yang menyimpulkan bahwa perempuan di lokasi wisata tersebut sudah berdaya), dan apa saja faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pemberdayaan. Sebagian studi sudah mengeksplorasi poin-poin tersebut lebih lanjut, namun banyak studi yang hanya bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan sudah berdaya atau belum. Maka dari itu, studi-studi selanjutnya bisa lebih mengeksplorasi poin-poin yang masih bisa digali.

KESIMPULAN

Potensi pariwisata di Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Begitu pula dengan dampak yang hadir seiring dengan

tumbuhnya sektor pariwisata terhadap masyarakat. Selain dampak positif, terdapat pula dampak negatif dari pariwisata yang tidak bisa diabaikan, terutama dampak terhadap lingkungan sebagai sumber daya utama pariwisata. Maka dari itu, untuk menjaga sektor pariwisata diperlukan strategi untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan adalah dengan melibatkan perspektif ekofeminisme. Ekofeminisme memandang perempuan dan lingkungan memiliki hubungan yang erat dan keduanya merupakan korban dari dominasi laki-laki. Selama perempuan masih terpinggirkan, maka pariwisata berkelanjutan tidak akan bisa dicapai. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi penting. Tidak hanya pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan psikologis, politik, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambad, S. N. A. (2012). Psychological Empowerment: The Influence on Organizational Commitment Among Employees in the Construction Sector. *The Journal of Global Business Management*, 8(2), 73-81.
https://www.researchgate.net/publication/343404477_Psychological_Empowerment_The_Influence_on_Organizational_Commitment_Among_Employees_in_the_Construction_Sector
- Amerta, I. M. S., Sara, I. M., & Bagiada, K. (2018). Sustainable Tourism Development. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 5(2), 248-254.
<https://sloap.org/journals/index.php/>

- irjmis/article/view/176
- Arisanty, D., Hastuti, K. P., Adyatama, S., & Angriani, P. (2020). Women's Empowerment in The Lok Baintan Floating Market, South Kalimantan Province. *Socius: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 94-103. <http://dx.doi.org/10.20527>
- Aziz, A. A. A. (2021). Is Ecofeminism a Curse or a Bliss? A Critical Study. *Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)*, 20-29. <https://www.ajsp.net/research/Is%200Ecofeminism%20a%20Curse%20or%20a%20Bliss.pdf>
- Camargo, B. A., Jamal, T., & Wilson, E. (2016). Toward a Critical Ecofeminist Research Paradigm for Sustainable Tourism. *Tourism Research Paradigms: Critical and Emergent Knowledges*, 22, 73-85. <http://dx.doi.org/10.1108/S1571-504320150000022011>
- Elshaer, I., Moustafa, M., Sobaih, A. E., Aliedan, M., & Azazz, A. M.S. (2021). The impact of women's empowerment on sustainable tourism development: Mediating role of tourism involvement. *Tourism Management Perspective*, 38, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100815>
- Eyben, R., Kabeer, N., & Cornwall, A. (2008). *Conceptualising empowerment and the implications for pro poor growth*. Institute of Development Studies. <https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/conceptualisingempowermentpaperforPOVNET.pdf>
- Fatimah, S. (2017). Ekofeminisme: Teori dan Gerakan. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 6-19. <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/220>
- Freund, D., & Maskivker, G. H. (2021). Women managers in tourism: Associations for building a sustainable world. *Tourism Management Perspectives*, 38, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100820>
- Golla, A. M., Malhotra, A., Nanda, P., & Mehra, R. (2011). *Understanding and Measuring Women's Economic Empowerment*. International Center for Research on Women (ICRW).
- Holden, A., & Fennell, D. A. (Eds.). (2013). *The Routledge Handbook of Tourism and the Environment*. Routledge.
- Kunjuraman, V., & Hussin, R. (2016). Women Participation in Ecotourism Development: Are They Empowered? *World Applied Sciences Journal*, 34(12), 1652-1658. <http://dx.doi.org/10.5829/idosi.wasj.2016.1652.1658>
- Murphy, P. D., & Gaard, G. C. (Eds.). (1998). *Ecofeminist Literary Criticism: Theory, Interpretation, Pedagogy*. University of Illinois Press.
- Niedziółka, I. (2012). : Sustainable Tourism Development. *Regional Formation and Development Studies*, 3(8), 157-166. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-25815-9_16
- Nkechi, I. J., & Emmanuel, A. I. (2017). Women and Ecology: An Eco-

- Feminist Reading of Chinua Achebe's Things Fall Apart. *International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS)*, 2(4), 33-40. <https://dx.doi.org/10.24001/ijels.2.4.5>
- Öztürk, Y. M. (2020). An Overview of Ecofeminism: Women, Nature and Hierarchies. *The Journal of Academic Social Sciences*, 81(13), 705-714. <http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.45458>
- Phillimore, J., & Goodson, L. (Eds.). (2004). *Qualitative Research in Tourism: Ontologies, Epistemologies and Methodologies*. Taylor & Francis.
- Rachmawati, E. (2020). Tourism and community empowerment at Gunung Leuser National Park, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1-13. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/528/1/012001>
- Rahayu, A. T. (2018). Gambaran Keberdayaan Perempuan di Desa Wisata Pentingsari berdasarkan Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS). *Gambaran Keberdayaan Perempuan di Desa Wisata Pentingsari berdasarkan Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS)*, 1(1), 1-11. <https://jurnal.ugm.ac.id/gamajts/article/view/36313/21214>
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56. <https://digilib.uinsgd.ac.id/5129/1/08IJBAS%283%29%281%29.pdf>
- Rusli, M., Firmansyah, R., & Az-Zahra, S. F. (2022). Community-Based Tourism as an Effort to Increase Women's Participation and Social Inclusion Receiving Tourism Benefits. *INTACT*, 485-491. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-73-2_35
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the Empowerment of Local Communities. *Tourism Management*, 20(2), 245-249. [http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7)
- Scheyvens, R. (2000). Promoting Women's Empowerment Through Involvement in Ecotourism: Experiences from the Third World. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(3), 232-249. <http://dx.doi.org/10.1080/09669580008667360>
- Sitindaon, W., Simbolon, E. T., Naibaho, F. R., Silabuan, P., & Panjaitan, T. M. (2022). Ambivalensi Pengembangan Potensi Wisata: Minimnya Inisiatif dan Kesadaran Masyarakat Lokal Menjadi Penggerak Pengembangan Sungai Aeksiegaon. *Media Wisata*, 20(2), 272-286. <http://jurnal.ampta.ac.id/index.php/MWS>
- Stein, J. (1997). *Empowerment and Women's Health: Theory, Methods, and Practice*. Bloomsbury Academic.
- Suardana, I. W. (2012). Pemberdayaan Perempuan di kawasan Kuta Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pariwisata Bali. *PIRAMIDA*, 6(2), 1-16.

- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/3002>
- Sunkad, G. (2023). Social Empowerment. *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education*, 2(1), 12-16. <https://univerpubl.com/index.php/scholastic/article/view/141>
- Swain, M. B., & Swain, M. T. B. (2004). An Ecofeminist Approach to Ecotourism Development. *Tourism Recreation Research*, 29(3), 1-6. <https://doi.org/10.1080/02508281.2004.11081451>
- UNWTO. (2013). *Sustainable Tourism for Development Guidebook*.
- UNWTO. (2019). *Global Report on Women in Tourism: Second Edition*. World Tourism Organization.
- Wardhani, A. A., & Susilowati, I. (2021). Four Dimensions of Women's Empowerment in Tourism: Case Study of Indrayanti Beach, Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(2), 170-184. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/10745>
- Yazdi, S. K. (2012). Sustainable Tourism. *American International Journal of Social Science*, 1(1), 50-56. https://www.aijssnet.com/journals/Vol_1_No_1_October_2012/6.pdf
- Oktober 2022, Jumlah Wisman ke Indonesia Capai 3,92 Juta Orang*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Retrieved March 12, 2023, from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/hingga-oktober-2022-jumlah-wisman-ke-indonesia-capai-3-92-juta-orang>

Internet

- OECD. (2020). *OECD Tourism Trends and Policies 2020*. OECD iLibrary. Retrieved Maret 11, 2023, from <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6c4fc1cd-en/index.html?itemId=/content/component/6c4fc1cd-en>
- panrb. (2022, December 27). *Hingga*